

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGAH

Ni Nyoman Warasati¹, Anhulaila M. Palampanga dan Mohammad Iqbal B.²

nyoman_warasati@yahoo.com

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of this sampling study is to determine and analyze the growth of local revenue, general allocation funds and capital expenditure. Also, it intends to determine and analyze simultaneous and partial influences of local revenue and general allocation funds on capital expenditure. Sample of this study consists of 11 regencies/cities in Central Sulawesi that have been selected by purposive sampling technique. Data analysis methods are growth ratio and multiple regression analysis. The results show that the average growth of local revenue, general allocation funds and capital expenditure tend to fluctuate during 3 years of budget period. Simultaneous test indicates that local revenue and general allocation funds have positive and significant influence on capital expenditure. Partial tests prove that local revenue has insignificant influence on capital expenditure while general allocation funds has positive and significant influence on capital expenditure. Determinant coefficient R-square of 0,413 indicates that 41,30% of capital expenditure is influenced by local revenue and general allocation funds, while the remaining of 58,70% influenced by other variables that have not studied.

Keywords: *local revenue, general allocation budget, and capital expenditure*

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan arti penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (UU tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam UU. No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004). Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pemerintahan daerah, baik dalam pengalihan maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki. Daerah diberikan kewenangan otonomi yang luas untuk mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil dan merata dan berkelanjutan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi Sumber Daya Keuangan secara optimal.

Bastian (2006:2) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah Kabupaten dan Kota ditandai dengan adanya

penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian. Halim (2001) menegaskan bahwa tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Penegasan ini menunjukkan bahwa daerah – daerah yang memiliki celah fiskal yang tinggi perlu memperkuat struktur anggaran belanjanya, bukan berarti daerah – daerah yang memiliki celah fiskal yang rendah tidak perlu memperkuat struktur belanjanya. Dengan memperkuat struktur belanja daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik karena anggaran yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pembangunan daerah merupakan anggaran publik. Alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus betul – betul dimanfaatkan untuk aktivitas – aktivitas pembangunan.

Komposisi Belanja Modal terhadap belanja daerah di 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 – 2015 rata – rata sebesar 23,87%. Hal ini sangat memprihatinkan karena 76,13% anggaran belanja pemerintah daerah direalisasikan untuk membiayai belanja-belanja yang sifatnya bukan sebagai belanja investasi. Rata-rata pertumbuhan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tampak berfluktuasi selama tiga tahun. Pada tahun 2013, rata-rata pertumbuhan Belanja Modal sebesar 25,66%, kemudian tahun 2014 pertumbuhan rata-rata Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 5,46%, tetapi tahun 2015 rata-rata pertumbuhan Belanja Modal kembali meningkat menjadi 30,92%. Untuk alokasi penerimaan PAD tahun 2013 sebesar 42 milyar dengan rata-rata

pertumbuhan 25,74%, tahun 2014 meningkat sebesar 63 milyar dengan rata-rata pertumbuhan 52,77% dan tahun 2015 kembali meningkat sebesar 77 milyar dengan rata-rata pertumbuhan 32,50%. Sedangkan realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2013 sebesar 5 triliun 867 milyar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,49%, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 5 triliun 975 milyar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,29% dan tahun 2015 kembali meningkat sebesar 6 triliun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,32%.

Berdasarkan uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum selama Tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan, sementara Belanja Modal mengalami fluktuatif atau naik turun. Dengan demikian besarnya proporsi Dana Alokasi Umum dibanding Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat, sementara pengelolaan Pendapatan Asli Daerah masih belum maksimal.

Uraian data di atas mencerminkan suatu kondisi yang menggambarkan perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada umumnya meningkat, namun tidak diiringi oleh perkembangan Belanja Modal yang sejalan. Dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah; 2) Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada

Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah; 3) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah; 4) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah; 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.;4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode verifikatif yaitu menguji kebenaran sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada dan digunakan untuk menguji. Dengan menggunakan metode penelitian verifikatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran akurat dan aktual mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat hubungan antara fenomena – fenomena objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data sekunder menggunakan runtut waktu (*time series*) selama 3 tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Sumber data

diperoleh dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah berupa LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Observasi (teknik pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian), Studi Pustaka (mengumpulkan berbagai literatur atau peraturan yang berkaitan dengan obyek penelitian), dokumentasi (pengumpulan data berdasarkan dokumen dan laporan tertulis) dan wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). *Software* yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah program SPSS *Statistics* 17.0

Populasi dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan dimensi waktu selama 3 (tiga) tahun. Adapun daerah Kabupaten/Kota yang menjadi Populasi adalah:

Tabel 1. Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebagai Populasi

No	Kabupaten/Kota
1	Kota Palu
2	Kab. Banggai
3	Kab. Banggai Kepulauan
4	Kab. Buol
5	Kab. Donggala
6	Kab. Morowali
7	Kab. Parigi Moutong
8	Kab. Poso
9	Kab. Sigi
10	Kab. Tojo Una Una
11	Kab. Toli-Toli
12	Kab. Banggai Laut
13	Kab. Morowali Utara

Sumber : Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, 2015

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan (*judgement*

Sampling). Adapun kriteria dari sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada kurun waktu tahun 2013-2015 yang berisi data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI)

Berdasarkan kriteria dari 13 Kabupaten/Kota dalam Populasi, ada 2 (dua) Kabupaten yang tidak memenuhi kriteria tersebut yaitu Kabupaten Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. Hal ini disebabkan karena 2 (dua) Kabupaten tersebut hanya memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2014-2015 karena merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan pada tahun 2013. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 Kabupaten dan 1 Kota. Penelitian ini memiliki dimensi waktu 3 tahun, sehingga jumlah pengamatan berjumlah 11 Kabupaten/Kota x 3 tahun menjadi 33 sampel pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013-2015 sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013-2015 (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2013	2014	2015	
1	Kota Palu	104,66	7,80	(8,93)	34,51
2	Kab. Banggai	29,00	22,48	(11,53)	13,32
3	Kab. Banggai Kepulauan	13,91	(37,18)	43,38	6,70
4	Kab. Buol	30,89	10,65	83,76	41,77
5	Kab. Donggala	34,20	(9,96)	41,51	21,92
6	Kab. Morowali	14,67	(43,97)	117,15	29,28
7	Kab. Parigi Moutong	12,11	16,54	24,99	17,88
8	Kab. Poso	(7,57)	37,82	(5,06)	8,40
9	Kab. Sigi	7,28	15,36	27,91	16,85
10	Kab. Tojo Una Una	(17,57)	38,60	39,34	20,12
11	Kab. Toli-Toli	60,74	1,96	(12,42)	16,76
Rata-rata		25,66	5,46	30,92	20,68

Sumber : LKPD TA. 2013 – 2015 (data diolah)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa rata-rata perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2013 sebesar 25,66% kemudian turun menjadi 5,46% pada tahun 2014 dan naik kembali menjadi 30,92% pada tahun 2015 dengan rata-rata perkembangan sebesar 20,68% setiap tahunnya.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 - 2015 sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013-2015 (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2013	2014	2015	
1	Kota Palu	23,97	55,49	20,21	33,23
2	Kab. Banggai	34,36	36,75	18,75	29,95
3	Kab. Banggai Kepulauan	6,10	11,81	29,82	15,91
4	Kab. Buol	83,35	17,12	30,97	43,81
5	Kab. Donggala	14,20	40,83	2,94	19,32
6	Kab. Morowali	28,19	(35,25)	193,75	62,23
7	Kab. Parigi Moutong	15,94	128,35	1,67	48,65
8	Kab. Poso	27,40	99,79	5,13	44,10
9	Kab. Sigi	19,12	70,98	8,13	32,74
10	Kab. Tojo Una Una	8,83	51,00	13,18	24,34
11	Kab. Toli-Toli	21,63	103,65	32,93	52,73
Rata-rata		25,74	52,77	32,50	37,00

Sumber : LKPD TA. 2013 – 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 3 nampak perkembangan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2013 sebesar 25,74% dan naik menjadi 52,77% pada tahun 2014 kemudian turun kembali menjadi 32,50% pada tahun 2015 dengan perkembangan rata-rata sebesar 37,00% setiap tahunnya.

Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 - 2015 sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 - 2015 (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2013	2014	2015	
1	Kota Palu	12,17	10,80	2,36	8,44
2	Kab. Banggai	22,56	11,77	5,17	13,17
3	Kab. Banggai Kepulauan	20,01	(22,25)	18,38	5,38
4	Kab. Buol	12,60	12,10	3,92	9,54
5	Kab. Donggala	12,64	9,55	5,38	9,19
6	Kab. Morowali	12,25	(53,40)	50,94	3,26
7	Kab. Parigi Moutong	13,03	12,19	4,93	10,05
8	Kab. Poso	14,56	10,02	5,57	10,05
9	Kab. Sigi	13,79	11,41	6,13	10,44
10	Kab. Tojo Una Una	14,08	13,16	5,66	10,97
11	Kab. Toli-Toli	11,73	9,80	5,06	8,87
Rata-rata		14,49	2,29	10,32	9,03

Sumber: LKPD TA. 2013 – 2015 (data diolah)

Tabel 4 diatas menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dengan rata-rata pada tahun 2013 sebesar 14,49%, tahun 2014 turun menjadi 2,29%, kemudian tahun 2015 kembali meningkat sebesar 10,32 % dengan rata-rata 9,03% setiap tahunnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah secara umum berfluktuatif/tidak stabil.

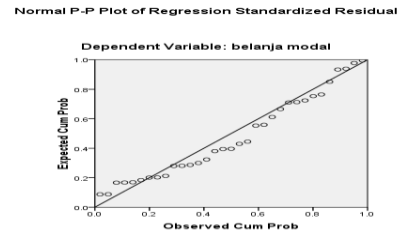
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normalitas bertujuan mengkaji apakah dalam model regresi kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali 2011). Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah: 1) Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; 2) Jika menyebar jauh dari diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Normalitas data dapat dilihat pada titik sebaran data yang dihasilkan dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah data

normal, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Normal Probability Plot

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dideteksi dengan menggunakan *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance value* diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant	1,00E+14	3,32E+13		
pad	.127	.065	.737	1.356
dau	.390	.151	.737	1.356

a. Dependent Variable: belanja modal

Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen > 0.1 dan nilai *VIF* semua variabel independen < 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan-kesalahan pada data runtut waktu (*time series*). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson* sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.643 ^a	.413	.374	3,87E+15	1.536

a. Predictors: (Constant), dau, pad

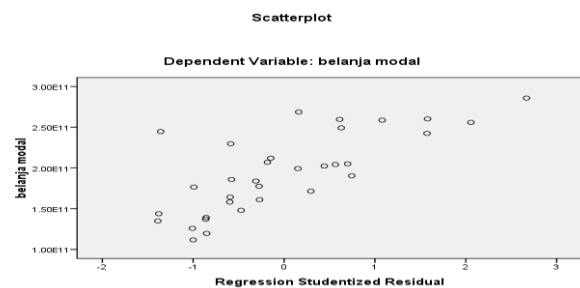
Sumber: Hasil olah data menggunakan SPSS

Nilai *Durbin Watson* berdasarkan tabel di atas diketahui sebesar 1,536, selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson* dengan signifikansi 5 %, dengan jumlah sampel $N = 33$ dan jumlah variabel independen 2 ($K=2$) = 1,536. Berdasarkan pada tabel *Durbin Watson*, maka diperoleh nilai $dU = 1,258$ sehingga nilai DW 1,536 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1,258 dan kurang dari ($4 - dU$) atau $4 - 1,258 = 2,742$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi. kriteria ini sebagaimana dikatakan oleh Ghazali (2011), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW test) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari ($4-dL$), maka hipotesis nol ditolak atau terdapat autokorelasi; b) Jika d terletak antara dU dan ($4-dU$), maka hipotesis nol diterima atau tidak terdapat autokorelasi; c) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara ($4-dU$) dan ($4-dL$), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas penelitian ini dilakukan

dengan melihat grafik *scatterplot*, sebagai berikut.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu y dan terlihat tidak ada pola yang jelas yang terbentuk dari titik-titik tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda merupakan salah satu alat statistik Parametrik dengan fungsi menganalisis dan menerangkan keterkaitan antara dua atau lebih faktor penelitian yang berbeda nama, melalui pengamatan pada beberapa hasil observasi (pengamatan) di berbagai bidang kegiatan.

Hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS for windows versi 17*. diperoleh hasil-hasil penelitian dari 33 sampel dengan dugaan pengaruh kedua variabel independen (PAD dan Dana Alokasi Umum) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependen Variabel Y = Belanja Modal				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t	Sig
C = Constanta	100319563403,254	33201758648,507	3,022	0,005
X ₁ = PAD	0,127	0,065	1,936	0,062
X ₂ = DAU	0,390	0,151	2,586	0,015
R-	= 0,643			
R-Square	= 0,413	F - Statistik	= 10556	
Adjusted R-	= 0,374	Sig. F	= 0,000	

Sumber : Data diolah, 2017

Model Regresi yang diperoleh dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 100319563403,254 + 0,127X_1 + 0,390X_2$$

Model persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 100319563403,254 berarti Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 100319563403,254.
2. Pendapatan Asli Daerah (X₁) dengan koefisien regresi 0,127 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pendapatan asli daerah dan Belanja Modal. Artinya bahwa setiap penambahan pendapatan asli daerah 1 satuan akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,127 satuan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Dana Alokasi Umum (X₂) dengan koefisien regresi 0,390 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara dana alokasi umum dengan Belanja Modal. Artinya bahwa setiap terjadi penambahan dana alokasi umum 1 satuan akan mengakibatkan terjadi penambahan Belanja Modal sebesar 0,390 satuan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak terbukti. Hasil pengujian

hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni Pendapatan Asli Daerah (X₁) dan Dana Alokasi Umum (X₂) dengan variabel tidak bebasnya Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yakni:

Hasil uji determinasi (kehandalan model) berdasarkan tabel 7 memperlihatkan nilai *R-Square* adalah 0,413. Hal ini berarti bahwa sebesar 41,30% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kedua variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Koefisien korelasi (R) memberikan makna tingkat keeratan variabel independen dengan variabel dependen, semakin tinggi nilai koefisien maka hubungan antar variasi semakin erat, hasil analisis di atas menunjukkan bahwa besaran koefisien korelasi *multiple R* adalah sebesar 0,643 = 64,3%. Hal ini berarti tingkat keeratan hubungan variabel tersebut adalah kuat.

Hasil uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikansi variabel dependen secara simultan terhadap variabel independen. Selanjutnya dari hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 10,556$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $\alpha < 0,05$. Dari tabel 4.29 menunjukkan bahwa nilai signifikansi $F = 0,000$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya. Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah berdasarkan hasil uji-F ternyata terbukti.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat apakah ada pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya.

Untuk variabel pendapatan asli daerah, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,127, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,062. Dengan demikian nilai $\text{sig } t > 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Hasil perhitungan menunjukkan pula bahwa nilai koefisien determinasi parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) adalah sebesar 0,315. Nilai ini memberi arti bahwa besarnya pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 31,5% dengan asumsi variabel lainnya dinilai konstan.

Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji- t ternyata tidak terbukti.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Untuk variabel dana alokasi umum, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,390, sementara tingkat signifikansi t sebesar 0,015. Dengan demikian nilai $\text{sig } t < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Hasil perhitungan menunjukkan pula bahwa nilai koefisien determinasi parsial variabel Dana Alokasi Umum (X_2) adalah sebesar 0,421. Nilai ini memberi arti bahwa

besarnya pengaruh variabel Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 42,1% dengan asumsi variabel lainnya dinilai konstan. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, berdasarkan hasil uji- t ternyata terbukti.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan terbuktinya hasil hipotesis tersebut mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya penerimaan PAD dan DAU maka akan semakin meningkat pula Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan adanya peningkatan PAD tersebut maka pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan Belanja yang dapat meningkatkan nilai Belanja Modal Pemerintah Daerah.

Disamping diberikan kewenangan untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan dari potensi daerah masing-masing, daerah juga diberikan sumber pendanaan lain dari pemerintah pusat melalui dana transfer berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Tujuannya adalah untuk membantu daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan dan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah.

Dalam menggerakkan iklim investasi di daerah agar dapat berkembang maka melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, pemerintah pusat mengamanatkan kepada daerah untuk menganggarkan Belanja Modal

minimal 30% dari total Belanja daerah. Namun kenyataannya di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah belum mampu mentaati Perpres tersebut karena kemampuan keuangan daerah dalam hal ini PAD masih sangat rendah sehingga pemerintah pusat memberikan alokasi dana transfer yaitu DAU, DAK dan DBH untuk perimbangan dana kepada semua Kabupaten/Kota sehingga penyediaan sarana prasarana fisik juga dapat meningkat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) dan pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun penerimaan PAD meningkat tidak terlalu mempengaruhi peningkatan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan karena kurangnya penggalan sumber – sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan karena pengelolaan pendapatan asli daerah yang belum optimal dimana penerimaan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah masih rendah bila dibandingkan dengan dana alokasi umum sehingga belum dapat mencukupi biaya seluruh kebutuhan pemerintahan. Daerah dengan PAD yang besar cenderung tidak memiliki Belanja Modal yang besar. Hal ini

disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai Belanja yang lain seperti Belanja rutin/Belanja operasional. Selain itu juga peningkatan PAD belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran Belanja Modal. PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan adanya pengaruh DAU yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dengan semakin meningkatnya penerimaan DAU akan meningkatkan pula Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan kemandirian daerah. Semakin banyak DAU yang diterima, berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu peran DAU dalam membantu daerah untuk menyediakan infrastruktur menjadi sangat penting agar kesejahteraan masyarakat di daerah dapat lebih meningkat.

Apabila DAU mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan Belanja Modal dan begitu pula sebaliknya apabila DAU yang ditransfer Pemerintah mengalami penurunan, maka Belanja Modal yang dikeluarkan Pemerintah juga akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya dana DAU akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan Belanja Modal. Selain itu juga adanya pengaruh DAU yang signifikan tersebut menunjukkan alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat tergantung pada besar kecilnya alokasi dana

perimbangan atau transfer oleh Pemerintah Pusat terutama DAU. Ini berarti tingkat kemandirian Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan di daerah, terutama untuk Belanja Modal masih sangat tergantung pada transfer Pemerintah Pusat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Pada Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.
2. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
4. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Rekomendasi

1. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah untuk dapat lebih meningkatkan penerimaan daerah utamanya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah adalah melalui intensifikasi yaitu dengan cara mengaktifkan perda-perda yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah, serta melalui ekstensifikasi yaitu dengan cara melakukan identifikasi sumber pendapatan untuk mencari peluang-peluang penerimaan pajak dan retribusi daerah yang baru serta mengintensifkan pengelolaan pemungutan pajak, dan perluasan subyek dan obyek pajak.
2. Adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan misalnya kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Tentu saja hal ini harus selaras, di mana peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga harus diimbangi dengan peningkatan layanan publik.

3. Hendaknya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah lebih memprioritaskan APBD pada belanja modal yang dapat menambah nilai ekuitas dana investasinya terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat maupun belanja modal yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan belanja lainnya.
4. Sosialisasi dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat (wajib pajak) mengenai hak dan kewajibannya serta manfaat dari Pajak/Retribusi Daerah yang dibayarkan, baik bagi wajib pajak maupun bagi pemda/pemkot dan menerapkan sanksi hukum kepada wajib pajak yang secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan, saran dan tanggapan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Anhulaila M. Palampanga, S.E.,M.S. sebagai Pembimbing Ketua dan Dr. H. Mohammad Iqbal., S.E.,Ak.,M.Si., sebagai Pembimbing Anggota yang selalu sabar dan tekun membimbing, memberikan perhatian dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.

Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah dan Fiscal Stress (sebuah studi kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia) *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (4) ; 346-35.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014.